

PROSIDING

Simposium Nasional (Simnas) V
Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN)
Tahun 2015

Tema :

“Inovasi dan Pembaharuan Pemerintahan Daerah Menuju
Tata Kelola Pemerintahan Indonesia yang Baik”

Padang, 7 - 9 Agustus 2015

Kerjasama :



Asosiasi Ilmuwan
Administrasi Negara



Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS Universitas Negeri Padang
Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN)
Pusat Kajian SuCCESs FIS UNP
IPDN Kampus Sumatera Barat
2015

ISBN : 978-602-72961-0-7

PROSIDING

Simposium Nasional (Simnas) V Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) Tahun 2015

Tema:

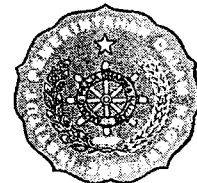
**"Inovasi dan Pembaharuan Pemerintahan Daerah Menuju
Tata Kelola Pemerintahan Indonesia yang Baik"**

Padang, 7 - 9 Agustus 2015

Kerjasama



Asosiasi Ilmuwan
Administrasi Negara



Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS Universitas Negeri Padang
Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN)
Pusat Kajian SuCCESs FIS UNP
IPDN Kampus Sumatera Barat
2015

Prosiding Simposium Nasional V Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) 2015

ISBN: 978-602-729-61-0-7

Diterbitkan oleh:

Jurusan IAN FIS UNP, Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN), Pusat Kajian SuCCESs FIS UNP, dan IPDN Kampus Sumatera Barat

Sekretariat:

Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp. (0751) 445187

Email: simnasasian52015@gmail.com

Hak Cipta© 2015 ada pada penulis

Artikel pada prosiding ini dapat digunakan, dimodifikasi, dan disebarluaskan secara bebas untuk tujuan bukan komersil (non profit), dengan syarat tidak menghapus atau mengubah atribut penulis. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dari penulis.

PROSIDING
Simposium Nasional (Simnas) V
Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) Tahun 2015

Penanggungjawab : Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. (Dekan FIS UNP)
Wakil Penanggungjawab : Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D. (Ketua Jurusan IAN FIS UNP)
Dra. Jumiati, M.Si. (Sekretaris Jurusan IAN FIS UNP)

Ketua Pelaksana : Aldri Frinaldi, SH., M.Hum, Ph.D.
Sekretaris : Adil Mubarak, S.IP., M.Si.
Bendahara : Nora Eka Putri, S.IP., M.Si.

Fasilitator Simposium:

1. Reviewer : 1. Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D.
2. Drs. Yasril Yunus, M.Si.
3. Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D.
2. Editor : 1. Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D.
2. Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D.
3. Afriva Khaidir, MAPA., Ph.D.
4. Dr. Dasril, M.Ag.
3. Layout Prosiding : 1. Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D.
2. Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si.
3. Dra. Heni Candra Gustina
4. Lince Magriasti, S.IP., M.Si.
5. Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si.
6. Siska Sasmita, S.IP., MAP.
7. Zikri Alhadi, S.IP., MA.
8. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si.

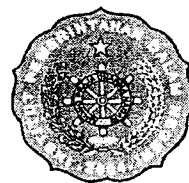
Sekretariat:

1. Silvia Megazarti, S.Sos.
2. Puja Scunda Permata, SE.
3. Dian Putri, S.AP.

Penerbit



Asosiasi Ilmuwan
Administrasi Negara



Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS Universitas Negeri Padang
Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN)
Pusat Kajian SuCCESs FIS UNP
IPDN Kampus Sumatera Barat
2015

Kampus UNP, Jalan. Prof Hamka, Air Tawar, Padang 25131

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Simposium Nasional V Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) Tahun 2015 ini dapat terselenggara dengan sukses.

Simposium Nasional V Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) Tahun 2015 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat, beserta Pusat Kajian Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (Pus-P3M) FIS UNP. Simposium ini dikemas dalam tema: "*Inovasi dan Pembaharuan Pemerintahan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Indonesia yang Baik*". Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, banyak Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi melalui pengembangan "program inovasi daerah" dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada gilirannya aneka inovasi ini seyogyanya menjadi cikal bakal dan inspirasi bagi Pemerintah untuk dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di segala level.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat menyelenggarakan Simposium Nasional. Bagi AsIAN simposium nasional ini adalah penyelenggaraan yang ke-V kalinya. Penekanan pembahasan simposium terdiri dari aspek kebijakan publik, manajemen pemerintahan, keuangan dan pembangunan, dan masalah sosial dan politik daerah. Dengan simposium ini diharapkan terjadi wacana akademik dan diseminasi pemikiran serta tukar menukar pengalaman di kalangan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) administrasi publik.

Simposium Nasional V AsIAN Tahun 2015 ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa ini di masa mendatang. Dalam simposium ini, alhamdulillah terkumpul 34 makalah yang disumbangkan oleh 48 orang penulis dan telah direview oleh tim reviewer serta layak untuk masuk ke dalam prosiding Simposium Nasional V Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) tahun 2015 dan telah dipresentasikan dalam empat kelompok sesi paralel sesuai dengan sub-sub tema yang tersedia.

Pada kesempatan ini, kami selaku ketua pelaksana menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Negeri Padang, pimpinan IPDN Kampus Sumatera Barat, pimpinan Fakultas Ilmu Sosial UNP, segenap pimpinan jurusan dan pimpinan prodi di Lingkungan FIS UNP, tim reviewer, dan seluruh panitia pelaksana yang telah berusaha memaksimalkan dan bekerjasama dengan baik hingga terlaksananya acara ini dengan sukses.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Padang, 7 Agustus 2015
Panitia

Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iii
<i>Subtema: Kebijakan Publik</i>	1 – 46
1. Otonomi Daerah di Indonesia: Bolak-Balik Antara Sentralisasi dan Desentralisasi (<i>Hanif Nurcholis</i>)	1 – 8
2. <i>Ears of the People</i> : Kajian terhadap Integritas dalam Administrasi Publik dalam Mekanisme Pelaporan pada Ombudsman Sumatera Barat (<i>Afriva Khaidir</i>)	9 – 15
3. Peraturan Nagari yang Berbasis Kebijakan <i>Bottom Up</i> di Sumatera Barat (<i>Yasril Yunus, Jumiaty, dan Dasman Lanin</i>)	16 – 22
4. Evaluation for Implementation of Home Affairs Minister Regulation No. 24/2006 on Integrated One Stop Service (PTSP) (<i>Tjahjo Suprajogo</i>)	23 – 32
5. Implementasi Kebijakan Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional di Kota Salatiga (<i>Endang Larasati, Ida Hayu Dwimawanti dan Ike Soraya</i>)	33 – 42
6. Implementasi Kebijakan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Kabupaten Batang (<i>Endang Larasati dan Giovanni</i>)	43 – 46
<i>Subtema: Manajemen Publik dan Pemerintahan</i>	47 – 78
7. Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif <i>Local Governance</i> (<i>Agus Prastyawan</i>)	47 – 53
8. Inovasi Pelayanan Rawat Jalan “Satu Meja Beres Perkara” di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan (<i>Hardi Warsono</i>)	54 – 61
9. Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan di Kabupaten Kudus (<i>Dyah Hariani</i>)	62 – 66
10. Kolaborasi Governance Sebagai Mesin Baru dalam Revitalisasi <i>Culture Set dan Mind Set</i> Birokrasi Di Kabupaten Pekalongan (<i>Titik Djumiarti</i>)	67 – 78
11. Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap: Studi pada Rumah Sakit Swasta Harapan Bunda Kota Batam Kepulauan Riau (<i>Aldri Frinaldi</i>)	79 – 87
<i>Subtema: Keuangan dan Pembangunan</i>	88 – 135
12. Kemampuan Perencana Pembangunan di Daerah (Kasus di Kantor Bappeda Kota Depok) (<i>Ayi Karyena</i>)	88 – 100
13. Dampak Program Bantuan Perkuatan Modal terhadap Tingkat Motivasi dan Kepuasan PKL di Kota Payakumbuh (<i>Syamsir dan Ideal Putra</i>)	101 – 112
14. Membangun Model Pembangunan Berbasis Komunitas Lokal: Tinjauan Kritis Terhadap Liberalisasi Kebijakan Tata Ruang (<i>Budiman Widodo dan Winarti</i>) ...	113 – 121
15. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Versus Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) (<i>Juni Eldi</i>)	122 – 128
16. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kota Pekanbaru (<i>Tuti Khairani Harahap</i>)	129 – 135
<i>Subtema: Masalah Sosial dan Politik Daerah</i>	136 – 260
17. Pembangkangan Penambang Kapur di Desa Bedoyo (<i>Aan Andrianto dan Samodra Wibawa</i>)	136 – 146

18.	Inovasi Pelayanan Perijinan Perikanan Tangkap di Jawa Tengah (<i>Kismartini</i>)....	147 – 154
19.	Modal Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Geografis untuk Menghadapi Resiko Bencana Gempa dan Tsunami di Nagari Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (<i>Zikri Alhadi</i>)	155 – 161
20.	Analisis Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) di Propinsi DKI Jakarta: Studi Kasus di Satlak PTSP Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat (<i>Bambang Istianto</i>)	162 – 171
21.	Perilaku Aktor dalam Proses Kebijakan Publik (<i>Karjuni Di Maani</i>)	172 – 177
22.	Tipologi Tata Kelola Penegakan Sanksi Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kabupaten Tabanan dalam Perspektif Governance (<i>Tedi Erviantono</i>)	178 – 182
23.	Identifikasi Hubungan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Persepsi Masyarakat (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Malang) (<i>Prasetyo Isbandono</i>)	183 – 188
24.	Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat Dalam Konteks Pelayanan Pemerintah Daerah (<i>Dasman Lanin</i>)	189 – 199
25.	Manajemen Marketing Politik (Studi Kasus Mareketing Politik Partai Gerindra Kota Padang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014) (<i>Adil Mubarak</i>)..	200 – 207
26.	Model Tata Kelola Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat (<i>M. Fachri Adnan dan Al Rafni</i>)	208 – 215
27.	Implementasi E-Lampid (Elektronik Lahir, Mati, Pindah, Datang) Dalam Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (<i>Meirinawati</i>)	216 – 222
28.	Tindak Korupsi Sebagai Tanda Buruknya Etika Birokrat dalam Perspektif Teori Etika Administrasi Publik dan Upaya Preventifnya (<i>Trenda Aktiva Oktariyanda dan Galih W. Pradana</i>)	223 – 233
29.	Penerapan E-Health dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (<i>Indah Prabawati</i>)	234 – 239
30.	Analisis Kajian Kelembagaan Pasar di Kabupaten Madiun (Studi Kelembagaan UPTD pada Pasar Daerah Kabupaten Madiun) (<i>Muhammad Farid Ma'ruf dan Tauran</i>)	240 – 248
31.	Profil Pasar Daerah di Era Otonomi Daerah (<i>Tauran, M. Farid Ma'ruf, Dewi Prastiwi, dan Eva Hany Fanida</i>)	249 – 255
32.	<i>Silent Announcement</i> : Pro-Kontra Sistem Informasi di Bandar Udara (<i>Fitrotun Niswah dan Eva Hany Fanida</i>)	256 – 260
33.	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Draft Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) (<i>Nur Hafni dan Fauzi</i>)	261 - 268
34.	Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak (<i>Indra Kertati dan Harsoyo</i>)...	269 – 281

DAMPAK PROGRAM BANTUAN PERKUATAN MODAL TERHADAP TINGKAT MOTIVASI DAN KEPUASAN PKL DI KOTA PAYAKUMBUH

Syamsir

*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Hamka, Air Tawar Padang
E-mail: syamsirsaili@yahoo.com*

Ideal Putra

*Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Hamka, Air Tawar Padang
E-mail: datukideal@yahoo.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui kebijakan Pemko di Kota Payakumbuh, terutama yang berkaitan dengan: 1) implementasi program bantuan perkuatan modal bagi PKL di Kota Payakumbuh, 2) tingkat keberhasilan program bantuan perkuatan modal bagi PKL di Kota Payakumbuh, dan 3) dampak program bantuan perkuatan modal terhadap tingkat motivasi dan tingkat kepuasan PKL di Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan menggunakan metode *field research*. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket, wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi pada beberapa instansi pemerintahan dan para PKL di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Analisis data kuantitatif dilakukan melalui analisis statistik deskriptif dalam bentuk frekuensi, persentase, dan mean (rata-rata). Sedangkan analisis data kualitatif dilakukan melalui *interactive model of analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) implementasi program bantuan perkuatan modal bagi PKL di Kota Payakumbuh terindikasi masih berada dalam kategori "cukup baik"; 2) tingkat keberhasilan program bantuan perkuatan modal bagi PKL di Kota Payakumbuh juga masih berada dalam kategori "cukup baik"; dan 3) dampak program bantuan perkuatan modal terhadap tingkat motivasi dan tingkat kepuasan PKL di Kota Payakumbuh masih berada pada kategori *cukup tinggi*, walaupun dalam beberapa aspek terindikasi *tinggi*, bahkan dalam aspek-aspek tertentu ada pula yang terindikasi *rendah*.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima (PKL), Perkuatan Modal, Pergerakan Modal, Tingkat Motivasi, Tingkat Kepuasan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang cenderung merosot selama hampir tiga dasawarsa ini di Indonesia telah banyak menimbulkan masalah dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kesulitan memperoleh pekerjaan dan kehilangan pekerjaan akibat PHK merupakan kenyataan yang banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pemecahan masalah paling sederhana yang muncul dari pemikiran sekelompok masyarakat kecil untuk bertahan hidup adalah menjadi pedagang dalam skala kecil dengan cara menjajakan berbagai jenis barang dagangan, makanan, atau minuman dalam skala kecil. Kelompok masyarakat ini yang sekarang lebih sering dikenal dengan sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Profesi sebagai PKL memang sangat dilematis. Di satu sisi profesi PKL merupakan tempat menggantungkan harapan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun di sisi lain sebagai

aktifitas usaha yang menggunakan ruang publik, orang-orang yang berprofesi sebagai PKL seringkali harus berhadapan dengan peraturan daerah setempat yang pada umumnya melarang orang berjualan di tempat-tempat yang seharusnya digunakan oleh masyarakat umum, seperti trotoar dan badan jalan, sehingga penyitaan dalam operasi penertiban oleh petugas merupakan sesuatu yang sangat ditakuti tapi tidak bisa dihindari oleh PKL.

Menurut Mulyanto (2007), krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat di Jawa Tengah menurun dan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin meningkat. Krisis ekonomi juga telah menyebabkan penurunan produktivitas perusahaan sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja dan akhirnya meningkatkan pengangguran. Untuk menanggulangi semakin banyaknya pengangguran, pemberdayaan sektor informal, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL), sangat diperlukan. Meskipun kasus yang

diungkapkan oleh Mulyanto adalah mengenai kondisi di daerah Jawa Tengah, namun boleh jadi kasus dan kondisi yang sama juga terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

Besarnya potensi yang terdapat di balik pertumbuhan sektor informal selama ini, termasuk PKL, belum terprediksi dengan baik. Sementara permasalahan sektor informal itu sendiri berkembang seiring dengan kompleksitas migrasi dan urbanisasi yang kian meningkat dari hari ke hari. Di beberapa kota besar PKL sering diidentikkan dengan masalah kemacetan lalu lintas, karena kelompok pedagang ini sering memanfaatkan trotoar sebagai media berdagang. Kelompok ini pun seringkali diusir dan dikejar petugas karena menggunakan lokasi berdagang tidak sesuai dengan tata ruang perkotaan. Akan tetapi, bagi sebagian kelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi mereka karena menyediakan harga lebih miring. Hal ini membuat pembersihan usaha mikro itu di lokasi-lokasi strategis menjadi kontroversial dilihat dari kaca mata sosial.

Pada satu sisi, beberapa tahun yang lalu, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM telah menginstruksikan agar PKL diarahkan dan dibina serta diberdayakan, karena dampaknya terhadap perekonomian daerah dan nasional sangat dahsyat. Namun di sisi lain keberadaan para PKL menjadi tidak nyaman manakala pemerintah daerah sudah mulai menerapkan kebijakan yang menyangkut masalah tata kota dan keindahannya. Selanjutnya, stigma negatif tentang keberadaan sektor informal, dalam hal ini PKL, semakin kental manakala muncul wacana *keindahan kota*, karena kalau dilihat dari segi estetika lingkungan keberadaan PKL ini terkesan semrawut dan kumuh serta dianggap mengganggu keindahan kota, sehingga keberadaan PKL di berbagai kawasan perlu digusur ke tempat lain.

Salah satu upaya untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah PKL yang dilematis ini maka Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM (dulunya Kementerian Koperasi Perindustrian dan Perdagangan-pen) telah meluncurkan program Registrasi dan Bantuan Perkuatan Modal bagi PKL di beberapa kota dan kabupaten di provinsi Sumatera Barat, yang diikuti dengan pembinaan para PKL dengan berbagai pelatihan dalam pengembangan usaha (Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat, 2009). Namun dalam implementasinya, program bantuan perkuatan modal ini tidaklah seefektif yang diharapkan. Muncul beberapa indikasi bahwa program ini kurang tepat sasaran, kurang efektif, kurang efisien, dan kurang optimal dalam mendorong keberhasilan PKL dalam berusaha, baik yang menyangkut dampak bantuan perkuatan modal tersebut terhadap tingkat motivasi PKL dalam berusaha maupun tingkat kepuasan PKL terhadap program bantuan tersebut.

Program registrasi PKL dan pemberian bantuan perkuatan modal PKL di provinsi Sumatera Barat, termasuk di Kota Payakumbuh dimulai sejak tahun 2008 sampai dengan 2014. Tujuan program Registrasi PKL tersebut antara lain: 1) Memberdayakan PKL melalui Koperasi sehingga PKL yang dibina memiliki kepastian berusaha; 2) Meningkatkan peran Koperasi dalam pengembangan serta pengelolaan sarana usaha PKL; 3) Memberikan contoh/model bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan sarana usaha PKL melalui Koperasi; dan 4) Mengevaluasi tingkat perkembangan usaha (kemajuan usaha dapat diukur). Namun untuk PKL Kota Payakumbuh program pemberian perkuatan modal PKL hanya dilaksanakan tahun 2008, 2010, 2011, dan 2013. Sejalan dengan itu, pihak Pemko Payakumbuh juga mulai memikirkan bagaimana supaya para PKL dapat hidup secara lebih bermartabat dan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Berdasarkan pemikiran di atas maka dipandang perlu untuk dilakukan suatu penelitian yang akan mencoba menggali berbagai informasi tentang dampak pemberian bantuan perkuatan modal terhadap tingkat motivasi dan kepuasan PKL di Kota Payakumbuh serta mengetahui seberapa besar tingkat persentase pergerakan modal PKL yang telah mendapatkan bantuan perkuatan modal tersebut. Target penelitian ini adalah diperolehnya gambaran awal tentang sejauhmana manfaat dan efektifitas dari program perkuatan modal PKL yang diterapkan pemerintah sehingga hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dan sekaligus hasil penelitian ini dapat menjadi basis bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan mengarah pada model pembinaan sumberdaya PKL sebagai *tulang punggung* perekonomian bangsa. Dengan demikian, melalui penelitian ini akan diungkapkan: 1) bagaimana implementasi program bantuan perkuatan modal bagi PKL di Kota Payakumbuh?, 2) bagaimana tingkat keberhasilan program bantuan perkuatan modal bagi PKL di Kota Payakumbuh?, dan 3) bagaimana dampak program bantuan perkuatan modal terhadap tingkat motivasi dan tingkat kepuasan PKL di Kota Payakumbuh?

2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Permasalahannya

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, di tempat umum, baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, dalam melaksanakan kegiatan usaha dagang. Tempat usaha PKL adalah tempat umum, yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar, dan lapangan serta tempat lain di atas tanah yang bukan miliknya atau di atas tanah milik negara yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Sementara pendapat lain menjelaskan, PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan informal dengan menggunakan

lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak atau peralatan bongkar pasang sesuai waktu yang telah ditentukan (Mulyanto, 2007).

PKL adalah salah satu profesi atau pekerjaan informal yang terdapat hampir di setiap kota dan di setiap negara manapun. Menurut Bromley (dalam Mulyanto, 2007), PKL merupakan kelompok tenaga kerja yang cukup banyak jumlahnya di sektor informal. PKL pada umumnya *self-employed*, artinya mayoritas PKL terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif kecil dan terbagi atas modal tetap dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi. Biasanya PKL mendapatkan dana atau pinjaman dari lembaga atau perorangan yang tidak resmi, atau bersumber dari *supplier* yang memasok barang dagangan kepada PKL. Sedangkan sumber dana dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya.

Disamping itu menurut Mulyanto (2007) PKL termasuk usaha kecil yang berorientasi pada laba (*profit*) layaknya sebuah kewirausahaan (*entrepreneurship*). PKL mempunyai cara tersendiri dalam mengelola usahanya agar mendapatkan keuntungan. PKL menjadi manajer tunggal yang menangani usahanya mulai dari perencanaan usaha, menggerakkan usaha sekaligus mengontrol atau mengendalikan usahanya. Padahal fungsi-fungsi manajemen tersebut jarang atau tidak pernah mereka dapati dari pendidikan formal. Manajemen usahanya berdasarkan pada pengalaman dan alur pikir mereka yang otomatis terbentuk sendiri berdasarkan arahan ilmu manajemen pengelolaan usaha. Hal inilah yang disebut "*learning by experience*" (belajar dari pengalaman).

Kemampuan manajerial memang sangat diperlukan PKL guna meningkatkan kinerja usaha mereka. Namun selain itu motivasi juga sangat diperlukan guna memacu keinginan para PKL untuk mengembangkan usahanya. Untuk mewujudkan pembinaan PKL yang produktif serta kemampuan memberikan kontribusi kepada daerah atau kota, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap PKL dengan cara menciptakan kemitraan antara sektor informal (PKL) dengan Pemerintah Kota. Pembinaan ini antara lain bertujuan untuk memotivasi para PKL agar dapat mengembangkan usahanya.

Disamping itu, hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan PKL di Manahan Surakarta mengungkapkan bahwa ada pengaruh antara modal usaha, jam kerja, lama usaha dan sikap usaha atau kewirausahaan terhadap pendapatan PKL dan faktor modal usaha merupakan faktor yang dominan mempengaruhi pendapatan. Sementara hasil penelitian tentang pengaruh modal

usaha dan perilaku kewirausahaan terhadap laba usaha PKL makanan dan minuman di pasar Gemolong Kabupaten Sragen juga mengungkapkan bahwa modal usaha dan perilaku kewirausahaan berpengaruh positif terhadap laba usaha pedagang kecil makanan dan minuman di Pasar Gemolong Sragen (Wardoyo, 2008). Sedangkan hasil penelitian Diah Ayu Ardiyanti (2006) mengenai kehidupan PKL dalam meraih keberhasilan mempertahankan ekonomi keluarga (studi kasus pedagang kaki lima di Sekitar GOR Manahan Surakarta tahun 2005-2006) juga mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha PKL di sekitar GOR Manahan Kota Surakarta tahun 2006 antara lain terdiri dari faktor modal usaha, persaingan yang memberikan motivasi untuk mencapai keberhasilan, lokasi usaha yang strategis, dan faktor regulasi atau peraturan pemerintah.

Pembinaan PKL di Indonesia

Berbagai penelitian tentang pembinaan PKL telah sering dilakukan di berbagai tempat (kawasan) di Indonesia, baik di kota maupun kabupaten. Berbagai rekomendasi juga sudah banyak yang ditawarkan. Namun tidak banyak dari rekomendasi itu yang jitu dan dapat memecahkan persoalan PKL dengan optimal. Pembinaan PKL yang seringkali didasari atau diikuti dengan pemberlakuan berbagai peraturan oleh Pemerintah, baik dalam bentuk UU maupun Perda atau Peraturan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ternyata tidak banyak yang mampu mengatasi dan memecahkan masalah PKL, malah seringkali semakin membuat para PKL menjadi semakin termarginalkan (Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat (2009)

Maria Sri Rahayu (2008) yang meneliti tentang PKL di Lapangan Puputan Margarana Denpasar menemukan bahwa ada beberapa alasan mengapa para PKL menolak dan keberatan dengan adanya relokasi, antara lain karena: 1) tempat yang disediakan untuk relokasi kurang strategis, 2) biaya sewa lahan atau tempat terlalu mahal. Bertahannya PKL di kawasan tersebut bukan semata-mata dilakukan untuk menentang kebijakan pemerintah (Perda) tetapi lebih disebabkan karena faktor pilihan rasional yang harus diambil sehingga mereka bisa tetap bertahan hidup.

Selain itu M. Aminuddin Farick (2004) yang meneliti tentang implementasi Perda Propinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan PKL dalam Wilayah DKI menemukan bahwa secara kumulatif kinerja implementasi kebijakan Perda tersebut masih rendah. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh faktor bantuan modal usaha bagi PKL tidak terealisasi. Aminuddin Farick antara lain merekomendasikan harus adanya alokasi dana dan penempatan aparat secara memadai dalam rangka pembinaan PKL, serta perlu adanya pengaturan

pelaksanaan dari setiap pasal dalam Perda No.5 Tahun 1978. Selain itu harus diberikan pemahaman yang mendalam bagi para implementor di lapangan bahwa PKL harus dipandang sebagai aset bangsa dan modal pembangunan.

Selanjutnya Bambang Wahyu Sudarmadji dan Sri Lestari Munajati (2005) berdasarkan penelitiannya di Kawasan PKL di Kota Bogor memberikan beberapa alternatif dalam penanganan atau pembinaan PKL di Kota Bogor berdasarkan pengelompokan kawasan PKL. Beberapa indikasi program penanganan dari setiap kelompok kawasan PKL tersebut antara lain melalui program *pembinaan* PKL yang terdiri dari: 1) Pembentukan Koperasi yang anggotanya para PKL; 2) Penambahan Modal usaha; 3) Pemberian insentif retribusi; 4) Penyerasian lapak, dan e)Penyediaan bantuan sarana usaha.

Sementara itu Ika Prasetyaningrum (2009) dalam laporan penelitiannya tentang Identifikasi Aktivitas PKL di Taman Seribu Lampu Kota Cepu mengemukakan bahwa permasalahan utama PKL di kota tersebut yaitu berkaitan dengan keberadaan aktivitas PKL di malam hari. Keberadaan PKL ini menjadi potensi bagi Taman Seribu Lampu sebab memberikan keramaian bagi kawasan ini pada malam hari. Di sisi lain aktivitas PKL di taman tersebut tidak tertuang dalam rencana tata ruang. Taman Seribu Lampu dalam rencana tata ruang direncanakan untuk memenuhi fasilitas olah raga dan rekreasi kota dan tidak direncanakan sebagai ruang aktivitas PKL.

Halomoan Tamba dan Saudin Sijabat (2006) yang meneliti tentang PKL sebagai *entrepreneur* yang terabaikan juga memberikan beberapa tawaran tentang pemberdayaan dan pembinaan PKL, antara lain pemberdayaan PKL melalui koperasi dan melalui kemitraan pemerintah dan swasta. Menurut mereka PKL pada umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas PKL terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif kecil, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi. Biasanya PKL mendapatkan dana atau pinjaman dari lembaga atau perorangan yang tidak resmi. Atau bersumber dari supplier yang memasok barang dagangan kepada PKL. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya. Ini mudah dipahami karena rendahnya tingkat keuntungan PKL dan cara pengelolaan uangnya pun sangat sederhana. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil. Oleh karena itu peranan koperasi akan sangat membantu para PKL.

Motivasi dan Kepuasan serta Pengukurannya

Motivasi dan Pengukurannya

Menurut Hasibuan (2003) motivasi berarti suatu perangsang, keinginan, dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang. Dengan kata lain, motivasi merupakan pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja atau bekerjasama dengan efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Selain itu Robbins (2008) berpendapat bahwa motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual. Sementara itu, Munandar (2001) mengemukakan pula bahwa motivasi merupakan suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan akan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Bila kebutuhan telah terpenuhi maka akan dicapai suatu kepuasan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi berkaitan dengan kekuatan yang mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan individu untuk bersikap dan berperilaku guna mencapai tujuan, baik individu maupun organisasi. Motivasi merupakan respon dari aksi, yaitu tujuan. Motivasi muncul karena ada rangsangan atau dorongan, yaitu tujuan, termasuk kebutuhan yang merupakan bagian dari tujuan.

Ada banyak model pengukuran tingkat motivasi yang telah dikembangkan oleh para ahli. Salah satu diantaranya yang paling populer adalah model yang dikembangkan oleh McClelland (dalam Mangkunegara, 2005) yang menjelaskan bahwa ada (enam) karakteristik yang digunakan untuk menentukan orang yang mempunyai motivasi berprestasi, yaitu: (1) memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi, (2) berani mengambil dan memikul resiko, (3) memiliki tujuan realistik, (4) memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuan, (5) memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam semua kegiatan yang dilakukan, dan (6) mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

Sementara Edward Murray (Mangkunegara, 2005) menjelaskan bahwa karakteristik orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi adalah sebagai berikut: (1) melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, (2) melakukan sesuatu dengan tujuan mencapai kesuksesan, (3) menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan usaha dan keterampilan, (4) berkeinginan menjadi orang terkenal dan menguasai bidang tertentu, (5) melakukan hal yang sukar dengan hasil yang memuaskan, (6) mengerjakan sesuatu yang sangat berarti, dan (7) melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang lain.

Motivasi para PKL yang akan diukur dalam penelitian ini dapat digolongkan kepada motivasi berprestasi dalam artian bahwa motivasi PKL untuk berdagang adalah bagian dari upaya untuk mencapai prestasi atau keberhasilan dalam menjalani kehidupan dan kebutuhan hidup melalui usaha dagang. Dengan demikian karakteristik atau model pengukuran motivasi berprestasi yang dikembangkan oleh McClelland ataupun Edward Murray dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat motivasi para PKL. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat motivasi para PKL adalah indikator seperti yang dikemukakan oleh Edward Murray.

Kepuasan dan Pengukurannya

Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (2007) dijelaskan bahwa kepuasan adalah "*the good feeling that you have when you achieved something or when something that you wanted to happen does happen, the act of fulfilling a need or desire; an acceptable way of dealing with a complaint, debt, an injury, etc*". Sedangkan Day (dalam Tjiptono, 2001) menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (*disconfirmation*) yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Dengan kata lain, kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja atau hasil dan harapan.

Menurut pendapat lain, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja produk dengan hasil yang diinginkan (Kotler, 2005). Jika kinerja memenuhi harapan, maka seseorang atau orang lain akan puas. Jika kinerja melebihi harapan, maka seseorang atau orang lain akan merasa amat puas. Sedangkan Jacobalis (dalam Suryo Suprpto, 1998) menyatakan bahwa kepuasan adalah rasa lega atau senang karena harapan tentang sesuatu terpenuhi. Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dilakukan atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa kepuasan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan keperluan seseorang terpenuhi. Suatu pelayanan atau program dinilai memuaskan bila ia dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya atau seseorang yang dibantunya.

Sebagaimana halnya pengukuran motivasi, model pengukuran tingkat kepuasan juga banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya pendapat yang dikemukakan oleh Garbarino dan Johnson, Anderson dan Narus, serta Garvin (dalam Tjiptono, 2001), yang mengemukakan bahwa untuk pengukuran kepuasan pelanggan digunakan tiga indikator yang meliputi: rasa senang, *share positive*

information, dan tidak komplain. Meskipun pengukuran kepuasan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut lebih tepat untuk mengukur kepuasan terhadap pelayanan, akan tetapi indikator ini bisa pula digunakan untuk mengukur kepuasan seseorang terhadap produk, hasil, program tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdapat atau berada di daerah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan populasi penelitian dan sesuai pula dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka penentuan sampel dalam kajian ini, terutama untuk pengumpulan data kuantitatif, dilakukan dengan teknik *proporsional stratified random sampling* untuk menentukan para PKL yang berasal dari berbagai latar belakang umur jenis kelamin, status perkawinan, lama berusaha, jenis usaha, dan karakteristik demografi lainnya secara proporsional.

Data kuantitatif diperoleh dari sampel responden yang telah ditetapkan melalui angket (*questionnaire*) dengan menetapkan lima alternatif jawaban tertutup dengan menggunakan skala *Likert*, mulai dari nilai 1 sampai 5 untuk pernyataan negatif dan nilai 5 sampai 1 untuk pernyataan positif. Sementara data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari para informan, terutama para pimpinan yang ada pada instansi yang bersangkutan yang ditentukan secara *purposive* dan *snowball*.

Pengolahan dan analisis data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui proses pengolahan dan analisis data kuantitatif sederhana dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dalam bentuk frekuensi dan persentase. Hasil analisis ini dilanjutkan dengan pemberian interpretasi data statistik dan seterusnya dilakukan penyimpulan hasil analisis. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik *interactive model of analysis* melalui tahap reduksi data, display data, tafsiran data, dan pengambilan kesimpulan.

Untuk menentukan tingkat kategori jawaban responden yang berhubungan dengan tingkat motivasi dan tingkat kepuasan maka dalam penelitian ini digunakan ukuran tingkat capaian rata-rata (TCR) jawaban responden. Ketentuan TCR jawaban responden dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- 0% - 25% = sangat rendah
- 26% - 50% = rendah
- 51% - 75% = cukup tinggi
- 76% - 100% = tinggi

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi dan Keberhasilan Program Bantuan Perkuatan Modal bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Payakumbuh

Berdasarkan beberapa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2008, 2010, 2011, dan 2013, serta kebijakan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sumatera Barat pada tahun-tahun yang sama maka setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) diberikan bantuan modal sebesar Rp. 300.000 (2008), Rp. 500.000 (2010), Rp. 1.000.000 (2011) dan Rp. 2.000.000 (2013) per orang. Program bantuan modal bagi PKL ini dimaksudkan sebagai cara atau alat untuk memotivasi para PKL agar lebih termotivasi dalam menjalankan profesinya sebagai PKL. Namun dalam prakteknya, pinjaman yang diperoleh PKL cukup beragam, sebagaimana yang terdata dari data lapangan. Artinya pihak koperasi pelaksana (penyalur) bantuan pergerakan modal PKL membuat kebijakan khusus pula dalam penyaluran bantuan tersebut sesuai dengan aturan peminjaman yang berlaku pada koperasi yang bersangkutan. Berdasarkan informasi dari beberapa informan pihak koperasi pelaksana dan responden PKL, jumlah pinjaman yang diberikan antara lain tergantung evaluasi pihak koperasi (seperti kemampuan anggota dalam pengembalian angsuran) dan juga “kedekatan” dan “pendekatan” anggota dengan pengurus koperasi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan program Registrasi dan Bantuan

Perkuatan Modal PKL yang dilaksanakan pada beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, termasuk di Kota Payakumbuh, adalah: 1) Memberdayakan PKL melalui Koperasi sehingga PKL yang dibina memiliki kepastian berusaha; 2) Meningkatkan peran Koperasi dalam pengembangan serta pengelolaan sarana usaha PKL; 3) Memberikan contoh/model bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan sarana usaha PKL melalui Koperasi; dan 4) Mengevaluasi tingkat perkembangan usaha (kemajuan usaha dapat diukur). Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program ini adalah: 1) Tertatanya PKL melalui wadah Koperasi; 2) Terwujudnya peningkatan peran Koperasi dalam memberikan pelayanan kepada para anggotanya; 3) Tersedianya anggota Koperasi dalam Sarana Usaha yang berkualitas; 4) Tergabungnya PKL melalui usaha formal Koperasi; dan 5) Tersedianya data base PKL telah diregistrasi se Sumatera Barat. Dalam implementasinya keberhasilan atau ketercapaian tujuan dan sasaran program tersebut antara lain dapat dilihat melalui beberapa indikasi atau tolok ukur berikut ini.

1) Pergerakan Modal PKL

Salah satu bentuk tolok ukur yang digunakan dalam melihat keberhasilan program bantuan perkuatan modal PKL adalah dengan cara melihat pergerakan (perkembangan) modal PKL yang menerima bantuan tersebut setelah mereka menerima bantuan. Untuk melihat pergerakan (perkembangan) modal PKL setelah menerima bantuan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Deskripsi Pergerakan Modal Pedagang Kaki Lima yang Mendapat Bantuan Perkuatan Modal di Kota Payakumbuh (dalam rupiah)

Jumlah Modal (Rp.)	Modal Awal Menjadi PKL		Modal Sebelum Mendapat Bantuan		Modal Setelah Mendapat Bantuan	
	f	%	f	%	f	%
Tidak Ada Jawaban	6	3.2	8	4.2	10	5.3
Kurang dari 500.000	2	1.1	2	1.1	-	-
500.000 - 1.000.000	24	12.6	24	12.6	2	1.1
1.000.001 - 5.000.000	18	9.5	36	18.9	26	13.7
Lebih dari 5.000.000	140	73.7	120	63.2	152	80.0
Total	190	100.0	190	100.0	190	100.0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS versi 16.0

Dari Tabel 1 di atas diperoleh gambaran bahwa ternyata modal yang dimiliki oleh PKL penerima bantuan perkuatan modal PKL di Kota Payakumbuh cukup beragam, baik jumlah modal awal yang mereka miliki pada saat pertama kali menjadi PKL, jumlah modal pada saat sebelum mendapatkan

bantuan modal, ataupun setelah mereka mendapatkan bantuan modal dari Dinas Koperindag Provinsi Sumatera Barat. Pada kolom modal awal terlihat bahwa kebanyakan dari para PKL (sekitar 73,7%) mengaku memiliki modal lebih dari Rp. 5 juta. Sedikit sekali di antara mereka (13,7%) yang

memiliki modal di bawah Rp. 1 juta. Hal ini antara lain berarti bahwa sebagian besar PKL yang mendapat bantuan perkuatan modal di Kota Payakumbuh termasuk PKL yang cukup mapan dari segi modal.

Begitu juga kondisi modal PKL sebelum mendapatkan bantuan, ada beberapa di antara PKL yang mengalami penurunan modal dibandingkan modal awal, terutama yang memiliki modal di atas Rp. 5 juta. Ini antara lain berarti bahwa sebagian PKL memang memerlukan tambahan (perkuatan) modal dalam berdagang. Selanjutnya setelah mendapatkan bantuan modal dari Koperindag

terlihat bahwa pergerakan modal cukup positif, terutama PKL yang memiliki modal di atas Rp 5 juta yang meningkat 16,8% dibandingkan sebelum mereka mendapat bantuan perkuatan modal.

2) Persentase Pertambahan Modal PKL

Selain itu pergerakan modal PKL penerima bantuan modal koperasi ini juga dapat dilihat dari persentase pertambahan modal mereka setelah menerima bantuan dari Koperindag sebagaimana tergambar dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Deskripsi Persentase Pertambahan Modal PKL yang Mendapat Bantuan Perkuatan Modal di Kota Payakumbuh setelah Menerima Bantuan

Persentase Petambahan Modal	f	%	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak ada Jawaban	24	12.6	12.6	12.6
0 - 10 %	66	34.7	34.7	47.4
11 - 20 %	16	8.4	8.4	55.8
21 - 50 %	82	43.2	43.2	98.9
Lebih dari 50 %	2	1.1	1.1	100.0
Total	190	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS versi 16.0

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dipahami bahwa ternyata pergerakan persentase modal para pedagang kaki lima di lokasi penelitian ini cenderung tinggi setelah mendapatkan bantuan modal. Hal ini antara lain tergambar dari cukup besarnya persentase PKL yang mengalami kenaikan persentase modal di atas 20%, yaitu sekitar 44,3%. Secara umum dapat dikatakan bahwa pergerakan modal PKL yang mendapat bantuan perkuatan modal di Kota Payakumbuh terkategori *cukup baik*, meskipun masih tidak bisa dikatakan *sangat baik*.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2 di atas, pergerakan modal PKL yang berkisar di atas 20% cukup besar, atau setidaknya-tidaknya lebih besar dari pada frekuensi pergerakan modal lainnya, yaitu 34,7% bagi mereka yang mengalami kenaikan atau pertambahan modal 0 – 10 % dan sekitar 8,4% bagi mereka yang mengalami kenaikan 11 – 20%. Sementara itu pergerakan modal menurun tidak bisa dideteksi karena ada 24 responden (12,6%) yang tidak memberikan jawabannya sehingga tidak bisa disimpulkan apakah yang bersangkutan mengalami penurunan modal ataukah sebaliknya (meningkat).

Dampak Bantuan Perkuatan Modal bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Tingkat Motivasi dan Tingkat Kepuasan PKL

Dalam penelitian ini juga diupayakan untuk melihat dampak pemberian pinjaman (bantuan) modal PKL terhadap tingkat motivasi PKL setelah mendapatkan

bantuan perkuatan modal dan tingkat kepuasan mereka terhadap bantuan perkuatan modal yang diberikan. Tingkat motivasi PKL dalam hal ini dilihat dari beberapa indikator seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu indikator seperti yang dikemukakan oleh Edward Murray (Mangkunegara, 2005). Sedangkan tingkat kepuasan PKL dalam hal ini antara lain dilihat dari beberapa indikator seperti yang dikemukakan oleh Garbarino dan Johnson, Anderson dan Narus, serta Garvin (dalam Tjiptono, 2001). Dalam penelitian ini indikator tersebut telah dijabarkan ke dalam beberapa indikator seperti: kepuasan PKL terhadap layanan yang diberikan oleh pihak koperasi pengelola, kesesuaian bantuan dengan harapan mereka terhadap bantuan tersebut, kesesuaian proses pemberian bantuan dengan harapan mereka, dan lain-lain.

1) Dampak Bantuan Perkuatan Modal terhadap Tingkat Motivasi PKL

Untuk melihat dampak bantuan perkuatan modal terhadap tingkat motivasi para PKL dalam menjalankan usaha mereka setelah menerima bantuan tersebut, antara lain dapat dilihat dalam berbagai segi dan indikator seperti telah diuraikan sebelumnya. Dampak tersebut dalam penelitian ini dilihat dari persentase jawaban dan tingkat capaian rata-rata responden, seperti terindikasi dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Deskripsi Rata-rata Skor Jawaban, TCR, Kategori Jawaban Responden Menurut Indikator Tingkat Motivasi Setelah Mendapatkan Bantuan Perkuatan Modal di Kota Payakumbuh

No	Indikator	Rata-rata Skor jawaban	TCR	Kategori
1	melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya	3.63	90.79	Tinggi
2	melakukan sesuatu dengan tujuan mencapai kesuksesan	3.14	78.42	Tinggi
3	menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan usaha dan keterampilan	2.04	51.05	Cukup tinggi
4	berkeinginan menjadi orang terkenal dan menguasai bidang tertentu	2.92	72.89	Cukup tinggi
5	melakukan hal yang sukar dengan hasil yang memuaskan	3.04	76.05	Tinggi
6	mengerjakan sesuatu yang sangat berarti	3.12	77.89	Tinggi
7	melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang lain	3.05	76.32	Tinggi
Keseluruhan Indikator Tingkat Motivasi		2.99	74.77	Cukup tinggi

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa rata-rata tingkat motivasi para PKL setelah menerima bantuan perkuatan modal PKL secara keseluruhan adalah terkategori *cukup tinggi*. Namun dalam aspek-aspek tertentu tingkat motivasi para PKL cenderung *tinggi*, seperti dalam indikator 1, 2, 5, 6, dan 7.

2) Dampak Bantuan Perkuatan Modal terhadap Tingkat Kepuasan PKL

Untuk melihat dampak bantuan perkuatan modal terhadap tingkat kepuasan para PKL terhadap

program bantuan perkuatan modal PKL yang diluncurkan oleh Dinas Koperindag Provinsi Sumatera Barat antara lain dapat dilihat dalam berbagai segi dan indikator seperti telah diuraikan pula bagian sebelumnya. Dampak pemberian bantuan perkuatan modal terhadap tingkat kepuasan PKL tersebut dalam penelitian ini juga dilihat dari persentase jawaban dan tingkat capaian rata-rata (TCR) responden seperti terindikasi dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Deskripsi Rata-rata Skor Jawaban, TCR, Kategori Jawaban Responden Menurut Indikator Tingkat Kepuasan Setelah Mendapatkan Bantuan Perkuatan Modal di Kota Payakumbuh

No	Indikator	Rata-rata Skor jawaban	TCR	Kategori
1.	Kesesuaian jumlah bantuan dengan harapan	2.95	73.68	Cukup tinggi
2.	Kesesuaian proses pemberian bantuan dengan harapan	3.15	78.68	Tinggi
3.	Kemudahan pemenuhan persyaratan peminjaman bantuan	3.06	76.58	Tinggi
4.	Kemudahan proses pendaftaran untuk mendapat bantuan	3.13	78.16	Tinggi
5.	Kepuasan terhadap proses pengembalian pinjaman	3.03	75.79	Tinggi
6.	Kepuasan (respons) terhadap tingkat bunga pinjaman	2.01	50.26	Cukup tinggi
7.	Kepuasan terhadap kesempatan (intensitas) peminjaman	3.05	76.32	Tinggi
8.	Kepuasan terhadap jangka waktu peminjaman	3.02	75.53	Tinggi
9.	Kepuasan terhadap beban biaya tambahan peminjaman	1.98	49.47	Rendah
10.	Kepuasan terhadap sikap adil pihak peminjam dalam pemberian bantuan	2.05	51.32	Cukup tinggi
11.	Sharing informasi hal-hal positif dalam pemberian bantuan	3.05	76.32	Tinggi
12.	Keluhan (complain) terhadap program pemberian bantuan	3.09	77.37	Tinggi
Keseluruhan Indikator Tingkat Kepuasan		2.80	69.96	Cukup tinggi

Berdasarkan Tabel 4 di atas terlihat bahwa rata-rata tingkat kepuasan PKL terhadap program bantuan perkuatan modal PKL secara keseluruhan juga terkategori *cukup tinggi*. Namun dalam aspek-aspek tertentu tingkat kepuasan para PKL cenderung tinggi, seperti dalam indikator 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, dan 12. Namun sebaliknya, dalam aspek kepuasan terhadap beban biaya tambahan dalam peminjaman terlihat tingkat kepuasan PKL terkategori rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan PKL terhadap bantuan perkuatan modal PKL ini dalam kedelapan aspek (indikator 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, dan 12) adalah tinggi. Hal ini senada dengan informasi yang diperoleh dari beberapa pengurus koperasi yang mengindikasikan bahwa pihak koperasi pengelola tidak pernah mempersulit para PKL dengan persyaratan yang memberatkan dalam memperoleh pinjaman. Bahkan kadangkala pihak koperasi terpaksa harus "jemput bola" dengan cara mendatangi (mencari) para PKL yang ingin mendapatkan pinjaman (bantuan), sebab kadangkala ada PKL yang "merasa takut" untuk meminjam karena membayangkan kesulitan memenuhi persyaratan atau bunga yang tinggi, seperti yang biasa mereka alami sebelumnya dari pihak lain (tengkulak) melalui "julo-julo tembak". Kadangkang mereka "trauma" dengan peminjaman kepada para tengkulak yang mereka alami sebelumnya, sehingga hal ini perlu dijelaskan kepada PKL. (Sumber: Wawancara dengan beberapa pengurus Koperasi Pengelola). Namun sebaliknya, dalam aspek beban biaya tambahan dalam peminjaman kecenderungan PKL memang rendah tingkat kepuasannya. Artinya, ada kemungkinan PKL masih dibebani dengan biaya tambahan yang menurut mereka hal itu cukup memberatkan. Namun, berdasarkan konfirmasi dari pihak pengurus koperasi biaya tambahan hanya sebatas biaya fotokopi surat-surat atau formulir kelengkapan peminjaman dan biaya pembeli materai. Meskipun ada juga beberapa PKL yang mengaku bahwa biaya tambahan juga termasuk "komisi" atau potongan dari pihak pengelola (sekitar 15 sampai 20%).

Berdasarkan Tabel 3 sebelumnya terlihat bahwa rata-rata tingkat motivasi para PKL setelah menerima bantuan perkuatan modal PKL secara keseluruhan adalah terkategori *cukup tinggi*. Namun dalam aspek-aspek tertentu tingkat motivasi para PKL cenderung tinggi, seperti dalam indikator 1, 2, 5, 6, dan 7. Tingginya tingkat motivasi PKL dalam kelima aspek ini dapat dijelaskan dengan alasan-alasan berikut.

Persaingan bisnis di era globalisasi saat ini semakin terasa dan mengkhawatirkan, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuklah usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). Pertarungan yang tak seimbang seringkali terjadi antara kalangan UMKM ini dengan pemodal besar (Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat, 2009). Dalam pertarungan yang tidak seimbang ini

sudah barang tentu dituntut semangat juang yang tinggi dari para petarung, dalam hal ini termasuk PKL. Sebab kalau tidak demikian pemasaran produk usaha rakyat yang sebagian besar diperankan oleh PKL pasti akan menjadi semakin terpinggirkan dan kesempatan berusaha para pedagang kecil dan menengah, terutama PKL, akan semakin terbatas.

Diah Ayu Ardiyanti (2006) yang meneliti kasus pedagang kaki lima di sekitar GOR Manahan Surakarta tahun 2005-2006 menemukan bahwa salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi PKL dalam menjalankan usahanya adalah faktor persaingan yang dapat memberikan motivasi bagi PKL untuk mencapai keberhasilan. Ini artinya bahwa persaingan sehat memang menjadi karakteristik yang mesti ada dan muncul dalam kehidupan PKL, dan persaingan dalam mencapai sesuatu memang menuntut dan mempersyaratkan adanya motivasi bagi para pesaing, termasuk PKL, dalam mencapai keberhasilan. Selanjutnya, upaya pencapaian keberhasilan pasti akan memerlukan usaha keras dan keterampilan yang menunjang pencapaian keberhasilan. Selain itu, karena usaha PKL pada umumnya merupakan usaha mandiri, dalam arti modal usaha adalah milik sendiri dan usahanya juga dijalankan sendiri, maka adalah sangat mungkin seorang PKL hanya bercita-cita dan berfokus kepada pengembangan bidang yang menjadi usahanya serta ingin sukses dan terkenal dalam bidang usahanya itu.

Selain itu, karena sebagian besar pedagang kaki lima yang menjadi sasaran penelitian ini dan sekaligus adalah sasaran program perkuatan modal PKL terdiri dari orang-orang Minang yang sangat terkenal dengan pedagang ulet dan tangguh maka tentu saja bisa diasumsikan bahwa pemberian bantuan perkuatan modal PKL ini sedikit banyaknya akan memberikan motivasi bagi mereka untuk lebih giat berusaha, walaupun dengan disertai oleh sikap *plus-minus* mereka terhadap bantuan modal tersebut, seperti kekurangpuasan dalam beberapa aspek pemberian modal itu.

Seperti telah umum diketahui, sifat atau karakteristik orang Minang dalam berdagang antara lain adalah ulet, gigih, dan inovatif (Arbie, 1984); atau seperti yang digambarkan oleh Hefner (1999), etika ekonomi orang Minang lebih bersifat kompetitif; memiliki orientasi pada kemajuan yang lebih terarah pada keberhasilan ekonomi dan mobilitas yang lebih tinggi; dan menempatkan dirinya secara berbeda ke tahap yang lebih tinggi dalam usaha dagang kecil dan kegiatan kewirausahaan lainnya. Sifat-sifat dan karakter ini sepertinya dapat disejalankan atau disinergikan dengan program dan sekaligus konsistensi dan keseriusan dari pemerintah dalam hal pemberian bantuan perkuatan modal ini.

Disamping itu tentu saja dengan beberapa pertimbangan yang memungkinkan agar pemberian bantuan tersebut benar-benar dapat meningkatkan

motivasi para PKL dalam menjalankan usahanya. Dengan kata lain, sekurang-kurangnya dengan adanya program bantuan perkuatan modal PKL yang diterapkan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), atau yang sekarang bernama Dinas Koperasi dan UMKM, maka secercah harapan masih dimiliki oleh para PKL untuk mengembangkan, setidaknya tidaknya mempertahankan, usahanya dalam rangka menyambung hidupnya dan keluarganya. Itu artinya bahwa motivasi untuk berusaha dan melanjutkan usaha masih tetap ada dalam diri para PKL dan barangkali saja meningkat dari yang biasanya.

Disamping itu, sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi PKL melalui program pemberian bantuan perkuatan modal ini, seperti yang tercantum dalam ketentuan atau aturan pelaksanaan program ini (Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat, 2009), maka sudah sewajarnya pemerintah melalui Dinas Koprindag dan pihak koperasi juga memikirkan usaha-usaha lain yang memungkinkan semakin berkembangnya dan berhasilnya usaha para PKL di kota ini. Artinya, program pembinaan PKL sebaiknya tidak hanya dalam bentuk pelaksanaan program pemberian bantuan perkuatan modal PKL saja, apalagi dengan jumlah bantuan yang terbatas dari segi besaran bantuan dan jumlah PKL yang menerima bantuan, akan tetapi juga harus dipikirkan upaya lain yang memungkinkan semakin meningkatnya motivasi PKL, seperti pemberian pelatihan manajemen usaha yang lebih terstruktur, perlindungan usaha yang lebih efektif dan mengayomi, melaksanakan supervisi atau pengawasan secara berkala dan teratur, dan usaha-usaha lainnya yang dapat membuat PKL lebih berhasil (Rangkuman hasil wawancara dengan beberapa informan).

Selanjutnya, merujuk kepada Tabel 4 sebelumnya terlihat bahwa rata-rata tingkat kepuasan PKL terhadap program bantuan perkuatan modal PKL secara keseluruhan juga terkategori *cukup tinggi*. Namun dalam aspek-aspek tertentu tingkat kepuasan para PKL cenderung tinggi, seperti dalam indikator 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, dan 12. Namun sebaliknya, dalam aspek kepuasan terhadap beban biaya tambahan dalam peminjaman terlihat tingkat kepuasan PKL terkategori rendah. Tingginya tingkat kepuasan PKL dalam aspek-aspek seperti yang disebutkan di atas dapat dijelaskan dengan alasan-alasan berikut.

Menurut Kepmen PAN No. 25 tahun 2004, ada beberapa dimensi yang perlu diperimbangkan dalam menciptakan kepuasan masyarakat dalam kaitannya dengan kinerja pegawai pelayanan publik. Ada 14 indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran dan sekaligus menciptakan kepuasan masyarakat dalam pelayanan oleh pegawai atau petugas pelayanan kepada masyarakat, antara lain yaitu: kemudahan *prosedur pelayanan*, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan, termasuk dalam hal *pemenuhan persyaratan* teknis dan administratif yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya dan *kewajaran biaya pelayanan*, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

Prinsip pelayanan seperti yang dituangkan dalam SK Menpan No. 25 tahun 2004 tersebut kelihatannya dipenuhi oleh setiap petugas pengelolaan pemberian bantuan perkuatan modal PKL yang disalurkan melalui pengurus koperasi masing-masing PKL. Begitu juga tingkat bunga yang ditetapkan dalam peminjaman bantuan perkuatan modal yang cukup rendah. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepuasan PKL dalam aspek beban biaya tambahan dalam peminjaman mungkin saja disebabkan oleh adanya "oknum-oknum nakal" yang bermain pada koperasi penyelenggara, padahal dalam ketentuan yang seharusnya beban biaya tambahan tidak perlu ada kecuali untuk keperluan fotokopi formulir peminjaman, pembelian materai, dan persyaratan administratif lainnya yang tidak memerlukan biaya banyak. (Rangkuman hasil wawancara dengan pihak pengurus Koperasi).

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya antara lain dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada dasarnya profesi Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi dan mampu bersaing di tengah persaingan perekonomian global, meskipun harus berhadapan dengan situasi krisis ekonomi dan moneter. Bertahannya PKL, termasuk di Kota Payakumbuh, bukan semata-mata dilakukan untuk menentang kebijakan atau protes terhadap pemerintah namun lebih disebabkan karena faktor pilihan rasional yang harus diambil sehingga mereka bisa tetap bertahan hidup.
2. Dalam kasus Kota Payakumbuh, pergerakan (pertambahan) modal PKL dari sebelumnya, setelah mendapatkan pinjaman lunak dari Koperindag Provinsi Sumbar melalui koperasi mereka pada masing-masing kota/kabupaten sangat beragam; ada pergerakan modal yang telah meningkat mencapai di atas 20%; ada pula yang meningkat hanya sampai di bawah 20%. Namun disamping itu ada pula yang meningkat cukup tajam sampai lebih dari 50%, meskipun persentasenya masih sangat kecil, yaitu hanya sekitar 1,1%.
3. Secara umum dapat dikatakan bahwa pergerakan modal PKL yang teregistrasi pada tahun 2008 -

2013 di Kota Payakumbuh masih terkategori *cukup baik*. Hal ini antara lain tergambar dari cukup besarnya persentase PKL yang mengalami kenaikan persentase modal di atas 20%, yaitu sekitar 44,3%.

4. Tingkat motivasi PKL dalam menjalani usaha sebagai PKL setelah menerima bantuan perkuatan modal PKL dari Dinas Koperindag Provinsi Sumatera Barat dan tingkat kepuasan terhadap bantuan modal yang diberikan hanya terindikasi *cukup tinggi* secara keseluruhan, namun dalam aspek-aspek tertentu terindikasi *tinggi*, bahkan dalam aspek tertentu masih ada yang terkategori *rendah*. Ini mengindikasikan bahwa pemberian bantuan perkuatan modal masih perlu ditingkatkan dalam berbagai aspek terkait dengan tingkat motivasi dan tingkat kepuasan PKL yang masih rendah agar pemberian bantuan perkuatan modal benar-benar mencapai sasaran secara efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat direkomendasikan/disarankan bahwa:

1. Untuk meningkatkan semangat dan motivasi serta kepuasan para PKL dalam mengembangkan usahanya maka diperlukan peningkatan jumlah pinjaman lunak sesuai dengan harapan dan jenis usaha yang mereka jalani. Mengenai besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada PKL, agar mereka lebih cepat berkembang, maka secara bertahap perlu diberikan pinjaman yang lebih besar sesuai dengan jenis dan besar usaha yang mereka jalankan. Disamping itu juga diperlukan pembinaan secara berkelanjutan, baik mengenai manajemen usaha, semangat usahawan, maupun mengenai training dalam bentuk klinik usaha.
2. Karena PKL bukan merupakan sektor yang membebani pemerintah maka PKL seharusnya tidak dimarginalkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku di setiap daerah (kota). PKL adalah salah satu bentuk kewirausahaan yang mandiri sehingga diperlukan ruang untuk para PKL agar bisa melangsungkan kehidupannya. Ruang yang diberikan hendaknya mampu menunjang kegiatan yang dilakukan bukan malah sebaliknya yang menjauhkan PKL dari aset hidupnya yaitu para pembeli.
3. Untuk meningkatkan modal yang mencapai 20% semakin banyak maka diperlukan:
 - a. Pengawasan dan supervisi secara periodik dalam bentuk monitoring dan menampung keluhan dan kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan;
 - b. Pembinaan secara berkelanjutan, baik mengenai manajemen usaha, semangat usahawan, maupun pengelolaan keuangan

yang belum efisien serta strategi pengembangan usaha;

4. Mengingat hasil analisis dalam penelitian ini dilakukan terhadap data yang sangat terbatas, maka yang dapat dilakukan adalah memberikan informasi mengenai deskriptif analitik, sehingga belum dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan yang bersifat final. Oleh karena itu, studi yang lebih mendalam dan komprehensif masih perlu dilakukan untuk mempertajam hasil analisis. Selain itu Mengingat keterbatasan data, studi ini hendaknya dipandang sebagai sebuah langkah awal dalam menyikapi keberadaan PKL yang semakin hari terasa semakin memerlukan perhatian dan penanganan yang arif dan bijaksana.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. *Evaluasi Kinerja*. Bandung: Refika Aditama
- Arbie, Alfian. 1984. "Bisnis Keluarga Suku Batak dan Minang dalam Polarisasi Konvensional" dalam Ahmad Ibrahim (ed). 1984. *Minangkabau-Minangrantau*. Medan: Offset Maju.
- Bambang Wahyu Sudarmadji dan Sri Lestari Munajati. 2005. "Klasifikasi dan Kajian Spasial Kawasan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor". dalam *Jurnal Ilmiah Geomatika* Vol.11 No.2, Des 2005.
- Diah Ayu Ardiyanti. 2006. "Kehidupan Pedagang Kaki Lima dalam Meraih Keberhasilan Mempertahankan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Sekitar GOR Manahan Surakarta tahun 2005-2006)" Laporan Penelitian.
- Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat. 2009. *Forum Koperasi*. Edisi. Juli, 2009 .
- Halomoan Tamba dan Saudin Sijabat. 2006. "Pedagang Kaki Lima: Entrepreneur Yang Terabaikan" dalam *Infokop* Nomor 29 Tahun XXII, 2006
- Hasibuan, M. S. P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hefner, Robert W. 1999. *Budaya Pasar Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalisme Asia Baru*. Jakarta: LP3ES
- Honby, A.S. 2007. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- Ika Prasetyaningrum. 2009. "Identifikasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Taman Seribu Lampu Kota Cepu". *Laporan Penelitian Tugas Akhir*. Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Jur. Perencanaan Wilayah dan Kota.

Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Indeks

- M. Aminuddin Farick. 2004. "Studi Kinerja Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kakilima: Studi Kasus: Implementasi PERDA Propinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kakilima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta". *Tesis*. Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada 2004.
- Maria Sri Rahayu. 2008. "Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perda No. 3 Tahun 2000: Studi Kasus di Lapangan Puputan Margarana Denpasar". *Laporan Penelitian*. Denpasar: Fakultas Pendidikan IPS Jurusan Sejarah IKIP PGRI Denpasar
- Mulyanto. 2007. "Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manajerial terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survei pada Pusat Perdagangan dan Wisata di Kota Surakarta)" dalam *Jurnal BENEFIT*, Vol. 11, No. 1, Juni 2007.
- Munandar, A. S. 2001. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: UI Press.
- Robbins, S.P and Judge, T.A., 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Suprpto, Suryo. 1998. "Analisis Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien Rawat Inap RSUD Dr. MURJANI". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Tjiptono, Fandi. 2001. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wardoyo. 2008. "Pengaruh Modal Usaha dan Perilaku Kewirausahaan Terhadap Laba Usaha Pedagang Kaki Lima Makanan dan Minuman Studi Kasus di Pasar Gemolong Kabupaten Sragen". <http://www.osun.org/usaha+kaki+lima-doc.html> diakses tanggal 12 November 2009).

Biodata Penulis

Syamsir, lahir di Jambi 1 April 1963. Menyelesaikan S1 pada Jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang tahun 1988. Memperoleh gelar Magister Sains pada Program Sosiologi-Antropologi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung 2000. Saat ini sedang melanjutkan Studi S3 (Ph.D.) dalam bidang Manajemen Publik, Universiti Utara Malaysia sejak tahun 2007. Sejak tahun 1989 dosen pada FIS UNP Padang.

Ideal Putra, lahir di Jambi pada 23 Juli 1963. Menyelesaikan S1 pada IKIP Padang tahun 1985 dan menyelesaikan S2 pada PPS Universitas Hasanuddin tahun 1999. Sejak tahun 1986 sampai sekarang menjadi dosen pada Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP Padang.